

BAB II

PERSEPSI MASYARAKAT DAN EFEKTIVITAS PENYALURAN

A. Kajian Teori

1. Persepsi

Kehidupan sosial dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh cara masyarakat memandang dan menilai suatu hal. Persepsi merupakan bentuk respons awal seseorang terhadap informasi atau realitas yang diterimanya. Menurut Jalaludin Rackhmat (2011:50) Persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi, sebagai berikut Jalaludin Rackhmat (2011:50), yaitu:

a. Faktor-faktor fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Krech dan Crutchfield Jalaludin Rackhmat (2011:55) merumuskan dalil persepsi bersifat selektif secara fungsional. Dalil ini berarti bahwa obyek-obyek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.

b. Faktor-faktor struktural

Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi berasal dari luar individu, seperti lingkungan, budaya, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu.

Persepsi dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai cara masyarakat menilai, memahami, dan memaknai proses penyaluran gas LPG 3 Kg, termasuk sejauh mana subsidi tersebut tepat sasaran dan diterima oleh pihak yang seharusnya. Pandangan ini terbentuk melalui pengalaman nyata yang dirasakan masyarakat, seperti kemudahan atau kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg, kondisi harga di lapangan, serta pengalaman berinteraksi dengan agen, pangkalan, dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Ketepatan sasaran dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan kebijakan subsidi dalam memastikan bahwa manfaat gas bersubsidi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak, seperti rumah tangga miskin pada kelompok 40 persen terbawah, nelayan, dan petani yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS. Suatu program dinilai tepat sasaran apabila kesalahan penerimaan dapat ditekan, baik kesalahan inklusi pada kelompok yang tidak berhak maupun kesalahan eksklusi terhadap kelompok sasaran, dalam batas toleransi yang wajar.

Dalam perspektif teori efektivitas, ketepatan sasaran menjadi

salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan suatu program. Efektivitas kebijakan diukur dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dan manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

2. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari istilah efektif yang berarti tingkat keberhasilan suatu upaya dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Konsep efektivitas juga sering dimaknai sebagai daya guna suatu kegiatan. Pada dasarnya, efektivitas menunjukkan kesesuaian antara hasil yang diinginkan dengan hasil nyata yang diperoleh dalam pelaksanaannya. Menurut William Dunn, (2006:429) menyatakan bahwa: Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Apabila setelah suatu kebijakan publik dijalankan ternyata hasilnya belum mampu mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dinilai belum berhasil. Namun demikian, dalam beberapa kondisi, dampak kebijakan tidak selalu dapat dirasakan secara langsung, karena efektivitasnya baru muncul setelah melalui tahapan dan proses tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Teori efektivitas memandang keberhasilan penyaluran gas LPG 3 Kg bersubsidi dari sejauh mana tujuan program tercapai, yaitu ketika manfaat subsidi benar-benar diterima oleh kelompok sasaran seperti rumah tangga miskin 40 persen terbawah, nelayan, dan petani yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS, serta ditandai dengan rendahnya tingkat kesalahan sasaran, baik penerima yang tidak berhak maupun sasaran yang justru tidak menerima bantuan.

3. Kriteria Penerima Bantuan

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 146/HUK/2013 (Menteri Sosial 2013) menyatakan bahwa masyarakat bisa dikatakan miskin dan dapat menerima bantuan jika dalam sebuah rumah tangga setidaknya termasuk kriteria sebagai berikut:

- a. Sumber penghasilan kepala rumah tangga dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000/bulan
- b. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
- c. Lantai tempat tinggal terbuat dari bambu/ kayu/tanah
- d. Dinding tempat tinggal dari bambu/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- e. Tidak memiliki fasilitas toilet/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- f. Sumber penerangan didalam rumah menggunakan lilin/lentera/tidak menggunakan listrik.

- g. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tercemar/sungai/air hujan.
- h. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- i. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
- j. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000 seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, atau barang modal lainnya.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

1. (Inayatni, 2024) “Pendistribusian Gas LPG 3 Kg pada Pangkalan di Kelurahan Surgi Mufti dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan distribusi gas LPG 3 kg pada pangkalan di Kelurahan Surgi Mufti dengan menggunakan sudut pandang etika bisnis Islam. Kajian difokuskan pada pelaksanaan penyaluran gas bersubsidi oleh pihak pangkalan, mencakup mekanisme distribusi, penetapan harga, kualitas pelayanan, serta sikap dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menyalurkan gas LPG 3 kg kepada masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pemilik pangkalan, konsumen gas LPG

3 kg, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan proses distribusi. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik distribusi gas LPG 3 kg dan penerapan nilai-nilai etika dalam kegiatan usaha tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pendistribusian gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh pangkalan di Kelurahan Surgi Mufti, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, pendistribusian gas LPG 3 kg telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain adanya perbedaan harga dari ketentuan harga ecer tertinggi HET serta keterbatasan pasokan yang berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam, praktik distribusi tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan amanah, khususnya dalam hal penetapan harga dan pemerataan akses gas LPG 3 kg bersubsidi bagi masyarakat yang berhak.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu dari Fadia Rima Inayatni (2024)

Nama Penulis/ Judul/ Tahun Terbit	Fadia Rima Inayatni/ Pendistribusian Gas LPG 3 Kg pada Pangkalan di Kelurahan Surgi Mufti dalam Perspektif Etika Bisnis Islam/ 2024
Persamaan	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian sebelumnya karena sama-sama membahas penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi sebagai objek utama. Keduanya menerapkan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menangkap realitas lapangan secara mendalam serta memahami dinamika distribusi gas bersubsidi di masyarakat.
Perbedaan	Perbedaan mendasar terlihat pada sudut pandang dan fokus kajian. Penelitian terdahulu lebih menekankan pendekatan etika bisnis Islam dengan perhatian utama pada perilaku dan praktik pangkalan, serta dilakukan sebelum penerapan kebijakan pengetatan berbasis NIK/KTP. Sementara itu, penelitian ini berangkat dari teori persepsi dan efektivitas kebijakan, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama. Fokusnya adalah menelaah bagaimana warga menilai ketepatan sasaran penyaluran LPG 3 kg setelah kebijakan NIK/KTP diberlakukan pada tahun 2026, berdasarkan pengalaman langsung yang mereka rasakan.

Sumber: Dibuat Oleh Penulis, 2026

2. (Ahdan, 2022) “Analisis Distribusi Gas LPG di Kelurahan Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”

Penelitian yang dilakukan oleh Fadila Ahdan dengan judul
“Analisis Distribusi Gas LPG di Kelurahan Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah” mengkaji

pelaksanaan distribusi gas LPG 3 kg di tingkat kelurahan dengan menempatkan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai sudut pandang analisis. Fokus penelitian diarahkan pada alur penyaluran gas LPG 3 kg dari agen hingga konsumen akhir, termasuk praktik penetapan harga, ketersediaan pasokan, serta perilaku para pelaku distribusi dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari agen, pangkalan, serta masyarakat pengguna gas LPG 3 kg di Kelurahan Tirta Siak. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran faktual dan pemahaman komprehensif mengenai kondisi distribusi gas LPG 3 kg yang berlangsung di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem distribusi gas LPG 3 kg yang diterapkan di Kelurahan Tirta Siak serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan nilai-nilai ekonomi syariah, khususnya prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural distribusi gas LPG 3 kg telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti harga jual yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan resmi serta keterbatasan pasokan pada waktu tertentu.

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa praktik distribusi gas LPG 3 kg belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan, karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu dari Fadila Ahdan (2022)

Nama Penulis/ Judul/ Tahun Terbit	Fadila Ahdan/ Analisis Distribusi Gas LPG di Kelurahan Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah/ 2022
Persamaan	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, terutama pada objek kajian yang sama, yaitu pendistribusian gas LPG 3 kg. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan untuk memahami praktik penyaluran gas bersubsidi berdasarkan kondisi nyata di masyarakat.
Perbedaan	Perbedaannya terletak pada sudut pandang dan konteks kebijakan yang dikaji. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif ekonomi syariah dan dilakukan sebelum penerapan kebijakan pembelian LPG 3 kg berbasis NIK/KTP, dengan tujuan menilai penyimpangan distribusi menurut prinsip Islam. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada penerapan kebijakan NIK/KTP yang berlaku saat ini, dengan menggunakan teori persepsi dan efektivitas untuk menggali penilaian masyarakat desa terhadap ketepatan sasaran penyaluran gas LPG 3 kg berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari.

Sumber: Dibuat Oleh Penulis, 2026

3. (Ramadhania, 2018) “Mekanisme Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong

dalam Perspektif Ekonomi Islam”

Mengkaji secara komprehensif pelaksanaan penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi di tingkat kelurahan. Kajian ini menitikberatkan pada pola distribusi yang dijalankan oleh agen dan pangkalan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait, seperti agen, pangkalan, dan masyarakat pengguna gas LPG 3 kg. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan serta pengumpulan dokumen pendukung guna memperoleh gambaran faktual mengenai proses distribusi yang berlangsung. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme pendistribusian gas LPG 3 kg di Kelurahan Bantaya serta menilai apakah praktik tersebut telah sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan keadilan, kejujuran, amanah, dan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran gas LPG 3 kg pada dasarnya telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai sejumlah kendala, seperti adanya perbedaan harga dengan ketentuan resmi serta lemahnya pengawasan distribusi. Ditinjau dari

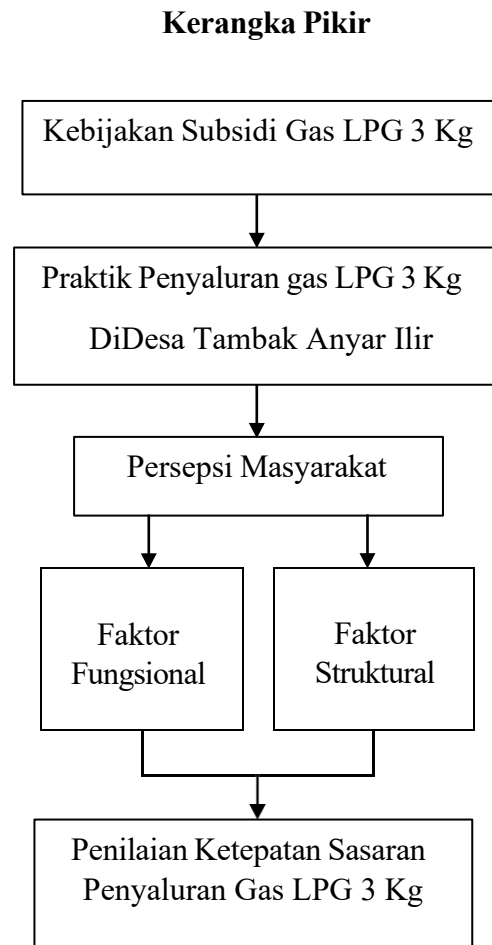
perspektif ekonomi Islam, kondisi ini menandakan bahwa praktik pendistribusian gas LPG 3 kg belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan, karena masih berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu dari Ramadhania (2018)

Nama Penulis/ Judul/ Tahun Terbit	Ramadhania/ Mekanisme Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dalam Perspektif Ekonomi Islam/ 2018
Persamaan	Penelitian ini memiliki titik temu yang kuat dengan penelitian sebelumnya karena sama-sama mengkaji persoalan distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami kondisi lapangan secara mendalam, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi langsung, serta dokumentasi guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik penyaluran gas bersubsidi di masyarakat.
Perbedaan	Meski demikian, terdapat perbedaan mendasar yang memperkaya posisi penelitian ini. Penelitian terdahulu menitikberatkan kajian pada perspektif ekonomi Islam dengan fokus pada mekanisme distribusi dan prinsip keadilan, serta dilakukan pada periode sebelum diberlakukannya sistem pembelian berbasis NIK/KTP. Sebaliknya, penelitian ini hadir dalam konteks kebijakan terbaru, dengan menempatkan persepsi masyarakat sebagai pusat analisis. Melalui pendekatan teori persepsi dan efektivitas, penelitian ini berupaya menggali bagaimana warga desa menilai ketepatan sasaran penyaluran LPG 3 kg berdasarkan pengalaman nyata mereka setelah kebijakan NIK/KTP diterapkan.

Sumber: Dibuat Oleh Penulis, 2026

C. Kerangka Pikir



Sumber: Dibuat Oleh Penulis, 2026.

1. Kebijakan Subsidi Gas LPG 3 Kg Sebagai Titik Awal

Kerangka berpikir penelitian ini diawali dari kebijakan subsidi gas LPG 3 kg yang ditetapkan pemerintah sebagai upaya menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong peralihan penggunaan minyak tanah ke gas, dengan sasaran utama rumah tangga berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, nelayan, dan petani. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut disertai dengan pengalokasian anggaran subsidi yang

besar serta pengaturan mekanisme distribusi, termasuk penggunaan identitas berbasis NIK/KTP, yang bertujuan memastikan bantuan disalurkan kepada pihak yang berhak.

2. Implementasi Penyaluran di Desa Tambak Anyar Ilir

Kebijakan nasional tersebut kemudian diterapkan di tingkat lokal melalui praktik penyaluran gas LPG 3 kg di Desa Tambak Anyar Ilir. Pada tahap ini, muncul berbagai dinamika di lapangan yang menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan kebijakan dengan realitas yang dialami masyarakat. Fenomena seperti kenaikan harga di tingkat pengecer, penggunaan gas LPG 3 kg bersubsidi oleh kelompok ekonomi menengah ke atas, serta keterbatasan akses bagi masyarakat kurang mampu akibat stok yang cepat habis menjadi pengalaman nyata yang dirasakan warga desa.

a. Pembentukan Persepsi Masyarakat

Kondisi riil dalam proses penyaluran tersebut kemudian membentuk persepsi masyarakat. Persepsi dalam penelitian ini dipahami sebagai cara pandang, penilaian, dan pemaknaan masyarakat terhadap pelaksanaan penyaluran gas LPG 3 kg, khususnya terkait keadilan dan kesesuaian distribusi dengan tujuan subsidi. Persepsi ini terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat dalam memperoleh gas, berinteraksi dengan agen atau pangkalan, serta menyaksikan praktik distribusi di lingkungan tempat tinggal mereka.

b. Faktor Fungsional dan Struktural dalam Pembentukan Persepsi

Pembentukan persepsi masyarakat tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh dua faktor utama. Faktor struktural mencakup aturan kebijakan yang berlaku, sistem distribusi, norma sosial, serta kondisi lingkungan dan budaya desa. Sementara itu, faktor fungsional bersumber dari dalam diri individu, seperti kebutuhan ekonomi, pengalaman pribadi dalam membeli gas LPG 3 kg, serta kepentingan dan harapan masyarakat terhadap keberlanjutan subsidi. Interaksi antara kedua faktor tersebut membentuk cara masyarakat memahami dan menilai kebijakan penyaluran gas LPG 3 kg.

b. Penilaian Ketepatan Sasaran Penyaluran Gas LPG 3 Kg

Tahap akhir dari alur kerangka berpikir ini adalah penilaian ketepatan sasaran penyaluran gas LPG 3 kg berdasarkan persepsi masyarakat. Ketepatan sasaran dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai ukuran efektivitas kebijakan secara normatif, melainkan sebagai penilaian subjektif masyarakat terhadap kesesuaian antara tujuan kebijakan subsidi dengan realitas distribusi yang mereka alami sehari-hari. Melalui pendekatan teori persepsi, penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana masyarakat menilai apakah gas LPG 3 kg telah disalurkan secara adil, tepat, dan sesuai dengan kelompok sasaran menurut pengalaman dan pemahaman mereka.